

Judul : Realisasi Belanja Melonjak  
Tanggal : Selasa, 07 April 2026  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 1-15

## Belanja dan Pendapatan Negara 2025-2026



### APBN

## Realisasi Belanja Melonjak

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan belanja negara pada awal 2026 mendorong pelebaran defisit anggaran. Dikhawatirkan belanja belum sepenuhnya berkualitas dan mengarah ke sektor produktif.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini melonjak 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan pola historis, belanja negara umumnya berada di kisaran 17 persen dari pagu anggaran pada setiap triwulan pertama.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, percepatan belanja tersebut merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun. "Memang *by design* kita ingin belanjanya lebih cepat," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Purbaya, selama ini, penyerapan anggaran kerap menumpuk pada akhir tahun sehingga dampaknya terhadap perekonomian tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah mengubah pola dengan mempercepat realisasi

belanja sejak awal tahun.

Di sisi lain, pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan belanja. Akibatnya, percepatan belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara turut mendorong defisit pada awal tahun.

Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2026, defisit tercatat mencapai Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-4)

## Realisasi Belanja Melonjak

(Sambungan dari halaman 1)

Menanggapi lonjakan belanja pada awal tahun, Purbaya menegaskan, percepatan belanja itu adalah konsekuensi dari strategi pemerintah untuk meratakan belanja sepanjang tahun.

Dari sisi komposisi, belanja tersebar relatif merata di berbagai pos. Namun, program Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang paling menonjol seiring besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk program unggulan Presiden itu. Walakin, pemerintah menyadari percepatan belanja berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas pengeluaran. Untuk itu, pengawasan akan diperketat.

"Kita akan monitor terus. Kalau ada belanja yang tidak tepat, akan kami beri peringatan. Bahkan, kalau perlu, bisa tidak di-

bayarkan," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada hari yang sama.

Menurut dia, mekanisme pengendalian tersebut telah diterapkan pada 2025 dan berkontribusi menjaga defisit tetap terkendali. Bahkan, realisasi defisit tahun lalu diperkirakan lebih rendah dari target awal.

Purbaya menekankan, strategi percepatan belanja tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, tetapi tanpa mengabaikan disiplin fiskal. Dalam jangka menengah, pemerintah juga mengandalkan peran sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan.

"Ekonomi kita 90 persen digerakkan sektor swasta. Selama investasi dan sektor riil kita jaga, pertumbuhan akan tetap berkelanjutan," ujarnya.

Dalam keterangan terpisah, Direktur Jenderal Strategi Eko-

nomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan, belanja MBG menjadi salah satu pendorong utama kenaikan belanja pada awal tahun. "Belanja yang sudah tereksekusi dengan baik, terutama MBG, sekarang sudah berjalan lebih cepat dibandingkan tahun lalu," ujarnya.

Di luar MBG, peningkatan belanja juga berasal dari proyek fisik yang mulai terealisasi lebih awal, seperti pembangunan irigasi dan jalan. "Kita memang ingin belanjanya lebih cepat. Terbukti sekitar 21 persen dari belanja itu tereksekusi di triwulan I. Ini jauh lebih tinggi daripada (triwulan I tahun-tahun) sebelumnya, yaitu sekitar 17 persen," kata Febrio.

### Sinyal waspada

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai, defisit APBN yang muncul pada

awal tahun memang masih dalam koridor yang dirancang pemerintah. Namun, menurut dia, perhatian seharusnya tidak hanya tertuju pada besaran defisit, tetapi juga pada kualitas belanja dan tekanan pembiayaan ke depan. Dalam struktur fiskal saat ini, laju belanja pemerintah lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan negara. Kondisi tersebut menyebabkan defisit terbentuk lebih dini di awal tahun anggaran.

"Secara teknis, kondisi ini belum mengarah pada krisis fiskal karena defisit APBN 2026 sendiri diproyeksikan sekitar Rp 698 triliun atau 2,6 sampai 2,7 persen terhadap PDB. Realisasi saat ini masih dalam batas yang direncanakan," ujarnya.

Kendati demikian, situasi ini menjadi sinyal agar pemerintah lebih waspada, terutama apabila penerimaan negara ke depan tidak tumbuh sesuai harapan. (DIM/EVA)